

Bretton Woods System: Eksistensi Hegemon Amerika Serikat Dalam Tataan Perekonomian Global Paska Perang Dunia

Andika Amrija Saragih

Alumni Program Studi Sarjana Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail: andikasagar@gmail.com

ABSTRACT

The strength of the United States in economic and military put him in the position in leadership as the most dominant actor after the outbreak of the First World War. The dominance showed in every decision and activity he participated in the political constellation and the global economy. One is through Bretton Woods System which is formed as well as the idea of the United States relating to the change and improvement of the structure of the post-war international monetary system. In the prewar period, the countries in the world more use gold as a single exchange rate system. But after the outbreak of the First World War, many countries experienced a decline in growth rates and instability in economic conditions due to the depleted gold reserves used to finance the war. The Bretton Woods System present to give enlightenment to all countries in order not to repeat the mistakes of the past which resulted in disruption of world economic structure. The system also managed to create international institutions such as the IMF, World Bank and WTO. The third institution initiated by the United States is the primary regulator in the respective proportions and play a role in promoting the liberalization of the economy. However, the Bretton Woods system did not last long because the great crisis facing the US in the 1970s led to the instability of the US domestic economic conditions that led to the collapse of the system which has been built for nearly half of the century.

Keywords: *United States, Bretton Woods System, liberal, economy, crisis*

Kekuatan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi maupun militer menempatkannya di posisi pemimpin sebagai aktor yang paling dominan paska pecahnya Perang Dunia Pertama. Dominasi tersebut ditunjukkannya dalam setiap keputusan dan aktivitas yang diikutinya dalam konstelasi politik dan perekonomian global. Salah satunya adalah melalui Sistem Bretton Woods yang merupakan bentukan serta gagasan Amerika Serikat yang berkaitan dengan perubahan serta perbaikan struktur sistem moneter internasional paska perang. Pada masa sebelum perang, negara-negara di dunia lebih banyak menggunakan emas sebagai sistem nilai tukar tunggal. Namun setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, banyak negara-negara yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dan ketidakstabilan dalam kondisi perekonomian dikarenakan cadangan emasnya habis digunakan untuk membiayai perang. Sistem Bretton Woods tersebut hadir untuk memberikan pencerahan kepada semua negara agar tidak lagi mengulang kesalahan masa lalu yang mengakibatkan terganggunya struktur perekonomian dunia. Sistem tersebut pun berhasil menciptakan institusi internasional seperti IMF, Bank Dunia maupun WTO. Ketiga institusi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat inilah yang menjadi regulator dalam proporsinya masing-masing dan berperan dalam mempromosikan liberalisasi perekonomian. Namun, Sistem Bretton Woods ini tidak berlangsung lama karena krisis besar yang dihadapi AS pada 1970an mengakibatkan ketidakstabilan kondisi perekonomian domestik AS yang menyebabkan runtuhnya sistem yang telah dibangun selama hampir setengah abad tersebut.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Sistem Bretton Woods, liberal, ekonomi, krisis

Pendahuluan

Sistem keuangan dan moneter dunia telah mengalami perkembangan dan transformasi dari abad ke abad. Hal ini dikarenakan telah ada perubahan dalam tatanan perekonomian internasional. Masa-masa perubahan tersebut dimulai saat *inter-war* dimana saat itu tatanan moneter dan perekonomian global sudah terintegrasi dimana semua negara menggunakan mata uang emas yang ditentukan oleh *gold-standard* sebagai alat tukarnya, namun sistem ini mengalami kemunduran sejak tahun 1914. Hingga pada tahun 1944, dibentuklah *Bretton Woods System* sebagai sebuah tatanan perekonomian global yang baru. Sistem Bretton Woods umumnya memang dipahami untuk merujuk pada rezim internasional yang berlaku sejak akhir dari Perang Dunia II hingga awal 1970-an. Sistem Bretton Woods ini adalah contoh pertama dari tatanan moneter global yang sepenuhnya dinegoisasikan dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan mata uang di negara-negara yang berdaulat.

Sistem Bretton Woods yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini secara diskursus memang dirancang sebagai aksi protes terhadap kebijakan proteksionisme negara-negara di tahun 1930-an. Asumsi dasar dari sistem ini adalah dalam sistem ekonomi dan politik internasional, akan terjadi sebuah dependensi mutual, resiprositas serta persamaan relatif di antara negara-negara. Ide dari Sistem Bretton Woods ini adalah intervensi politik diperlukan dalam ekonomi global, dengan batasan dimana intervensi yang dilakukan dibatasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu (Peet 2003:27). Intervensi politik yang dilakukan tersebut dapat dilakukan jika berkaitan dengan hal-hal seperti *public collective goods*, saat terjadi kegagalan pasar, dan ketika ada kegiatan monopoli yang terjadi dalam mekanisme pasar.

Selama perkembangannya, Sistem Bretton Woods ini menghasilkan tiga rezim dan institusi yang menjadi regulator dalam tatanan perekonomian internasional, antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan World Trade Organization (WTO). Sistem-sistem institusi yang dihasilkan dari *Bretton Woods System* ini sangat erat kaitannya dengan Amerika Serikat yang ingin mengembangkan perekonomian liberal yang mengedepankan pasar bebas dan bebas proteksi dalam mekanisme pasar global. Untuk mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian global, Amerika Serikat mengembangkan stabilitas hegemoninya untuk tetap menjadi aktor unipolar yang memiliki peran penting sebagai penguasa, baik dalam tatanan perekonomian maupun dalam menciptakan stabilitas politik global.

Transformasi Sistem Keuangan Internasional Dari Masa ke Masa

Tahun 1870 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangkitnya perekonomian dunia. Dikarenakan mulai saat itulah, dalam perekonomian dunia dapat ditemukan adanya jaringan keuangan antarnegara yang cakupannya sangat luas sehingga dapat disebut sebagai sistem moneter dunia. Secara garis besar, transformasi sistem keuangan dunia berkembang dalam tiga tahap yaitu pra-Perang Dunia, saat Perang Dunia dan paska Perang Dunia (Helleneir 2008)

Sistem standar emas merupakan sistem moneter internasional yang digunakan hingga menjelang pecahnya Perang Dunia. Diantara semua sistem moneter yang pernah ada, sistem moneter inilah yang memiliki sejarah sebagai sistem moneter yang paling lama digunakan. Sistem standar emas ini bukan lahir dari prakarsa seseorang ataupun institusi-institusi internasional melainkan hasil dari evolusi praktek-praktek transaksi internasional yang pernah ada. Oleh karenanya, tidak bisa ditetapkan dengan pasti kapan sistem ini mulai diberlakukan. Setelah pecahnya Perang Dunia pertama, sistem

emas ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara namun Eropa mulai menggunakan sistem ini kembali paska Perang Dunia pertama berakhir. Namun dalam pengimplementasiannya, hal ini terkendala oleh terjadi depresi pada tahun 1929 yang mengakibatkan mereka harus meninggalkan sistem standar emas kembali (Helleneir 2008).

Beberapa keuntungan menggunakan sistem standar emas menurut para ahli antara lain (elearning.gunadarma.ac.id, diakses 22 Mei 2015) stabilnya kurs valuta asing, serta defisit maupun surplus neraca pembayaran tidak berlangsung lama melainkan secara otomatis menyusut untuk kemudian dikembalikan ke keadaan seimbang kembali, sedangkan kelemahannya adalah dengan stabilnya kurs valuta asing tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya jumlah mata uang yang beredar yang juga tentunya akan berdampak kepada menurunnya aktivitas ekonomi maupun menurunnya tingkat harga dikarenakan disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan timbulnya aliran emas masuk ataupun keluar. Jika aliran emas masuk, maka hal itu akan mengakibatkan harga dan kegiatan ekonomi cenderung akan naik sedangkan jika aliran emas keluar, maka akibatnya akan terjadi penurunan harga dan dapat mengakibatkan naiknya angka pengangguran. Meskipun penggunaan sistem standar emas mengalami pasang surut dalam penerapannya, namun sistem ini nyatanya masih tetap digunakan oleh banyak negara saat itu sebagai alat tukar yang relatif stabil.

Dalam keadaan perang, perekonomian dunia saat itu terpecah belah menjadi satuan-satuan kecil perekonomian nasional dimana tidak ada sistem internasional yang menaunginya. Selama Perang Dunia I berjalan, sistem moneter internasional yang menggunakan standar emas pun berhenti berfungsi. Perekonomian nasional negara-negara yang sebelumnya terintegrasi melalui konvertibilitas melalui *fixed exchange-rate* mulai terputus (elearning.gunadarma.ac.id, diakses 22 Mei 2015). Dalam periode *interwar* ini, kebanyakan perekonomian di beberapa negara dipengaruhi oleh tingkat inflasi tinggi yang terjadi. Hal ini dikarenakan pemerintah yang cenderung *massive* dalam membiayai perang dengan menggunakan kebijakan anggaran belanja dengan mencetak banyak uang kertas. Tidak sedikit pula negara yang membiayai perang melalui cadangan valuta asing beserta kekayaan luar negeri mereka sehingga tidak sedikit negara yang sebelumnya menjadi kreditur, namun setelah perang berubah menjadi debitur.

Berakhirnya Perang Dunia I yang terjadi selama empat tahun mengubah suasana perang menjadi keinginan untuk melaksanakan rekonstruksi terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat perang berupa perbaikan sarana prasarana maupun pembenahan lembaga-lembaga perekonomian baik swasta maupun domestik. Negara-negara seperti Inggris, Perancis maupun beberapa negara lainnya berinisiatif untuk kembali menggunakan sistem standar emas sebagai alat tukar dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan perekonomian seperti yang sebelumnya mereka pernah raih melalui sistem standar emas tersebut. Harapan tersebut pun membuahkan hasil dimana keputusan untuk menggunakan sistem standar emas kembali dalam tatanan perekonomiannya, meskipun hasilnya tidak terlalu signifikan seperti halnya sebelum Perang Dunia I pecah.

Hingga setelah berakhirnya Perang Dunia I dimana Inggris kehilangan kemampuannya untuk mengatur tatanan perekonomian dan moneter global, Amerika Serikat muncul sebagai pemimpin kreditor dunia yang menawarkan bantuan salah satunya adalah Marshall Plan yang ditujukan untuk membantu pembangunan kembali paska perang serta mengganti nilai tukar emas sebagai *fixed exchange-rate* menjadi nilai tukar dollar.

Bretton Woods System: Sejarah dan Awal Kemunculannya

Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengambil pimpinan dalam menentukan institusi dan peraturan baru yang mendasari perekonomian dunia liberal yang berubah. Sistem tersebut dikenal dengan sebutan “Sistem Bretton Woods” nama kota kecil di Amerika Serikat tempat persetujuan tersebut pertama kali dibuat pada tahun 1947 untuk membentuk lembaga-lembaga penting perekonomian pasar liberal pasca perang antara lain IMF sebagai regulator moneter dunia serta mengatasi permasalahan utang negara, Bank Dunia yang sebelumnya dinamakan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang didirikan sebagai institusi yang memperbaiki kondisi perekonomian negara paska perang serta GATT yang sekarang menjadi WTO yang didirikan untuk mengatur perdagangan dunia yang mengedepankan perdagangan yang membebaskan sektor barang maupun modal (Jackson & Sorenson. 2005:249). Konferensi yang diadakan di News Hampshire, Amerika Serikat ini merupakan puncak dari dua setengah tahun perencanaan untuk rekonstruksi paska perang moneter yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat dalam menentukan sistem moneter apa yang akan digunakan sebagai regulasi global. Konferensi yang dihadiri oleh empat puluh negara sekutu ditambah dengan satu negara dari pemerintahan netral (Argentina), diskusi konferensi tersebut didominasi oleh dua rencana saingan yang ingin dikembangkan, masing-masing melalui Harry Dexter White dari Departemen Keuangan AS dan John Maynard Keynes dari Inggris. Kompromi yang terjadi dalam konferensi tersebut lebih berpihak kepada Amerika Serikat yang mencerminkan jika kekuatannya paska Perang Dunia II baru saja akan dimulai.

Kesenjangan yang terjadi antara White dan Keynes berkenaan dalam hal akses yang berhubungan dengan likuiditas internasional. Namun, ada beberapa kesamaan yang diutarakan oleh negara-negara yang menghadiri pertemuan tersebut dimana negara-negara sepakat jika kekacauan moneter yang terjadi telah mengajarkan banyak hal kepada negara-negara tersebut, khususnya setelah Perang Dunia II berakhir. Semua bertekad untuk tidak mengulangi dan menghindari apa yang mereka anggap sebagai sebuah masa lalu.

Negosiasi yang terjadi dalam konferensi yang merupakan rangkaian dari kegiatan *United Nations Monetary and Financial Conference* gagasan Amerika Serikat ini sebenarnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana krisis yang sedang dialami oleh dunia internasional saat itu, salah satu penyebab terbesarnya adalah kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara. Namun, Amerika Serikat dan Inggris yang sebelumnya telah melakukan negosiasi tidak memiliki persepsi yang sama akan hal ini (Peet 2003:27). Oleh karenanya, Amerika Serikat mengundang beberapa negara lainnya untuk ikut dan hadir serta berdiskusi untuk menghasilkan sebuah solusi mengenai bagaimana seharusnya negara-negara saat itu menyikapi krisis yang sedang terjadi. Adapun, negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut khususnya oleh AS dan Inggris adalah pertama, negosiator umumnya sepakat jika periode selama perang yang terjadi menghasilkan kelemahan mendasar yang tak terkendali dari fleksibilitas sistem nilai tukar (Bordo & Eichengreen 1993). Tingkat suku bunga yang mengambang sejak tahun 1930-an dianggap telah memperkecil intensitas perdagangan dan investasi serta mendorong terjadinya spekulasi destabilisasi dan depresiasi yang kompetitif.

Kedua, negara-negara sepakat jika nilai tukar tidak mengambang secara bebas, maka negara juga akan membutuhkan jaminan yang cukup atas cadangan moneter yang tersedia. Negosiator tidak perlu berpikir jika ingin mengubah cara pembayaran yang menggunakan *gold standard* yang telah diwarisi dari tahun ke tahun sejak 1870an. Likuiditas internasional tetap terdiri dari mata uang emas serta mata uang *convertible* baik secara langsung ataupun tidak langsung (Bordo & Eichengreen 1993). Khususnya

Amerika Serikat yang memiliki kekuatan untuk mengubah peran sentral dollar ataupun nilai dari cadangan emas yang dimilikinya, yang saat itu berjumlah tiga perempat dari jumlah semua emas yang ada di dunia. Ketiga, negara-negara sepakat jika hal itu sangatlah diperlukan untuk menghindari terulangnya perang yang dilandasi atas faktor ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1930-an. Beberapa kerangka peraturan yang ditetapkan memastikan bahwa negara-negara akan menghapus kontrol pertukaran terhadap mata uang konvertibilitas dan kembali ke sistem pembayaran multilateral. Dan terakhir, negosiator sepakat jika ada kebutuhan untuk sebuah forum kelembagaan dalam kerja sama internasional yang menangani masalah moneter (Bordo & Eichengreen 1993). Masalah mata uang selama *interwar* menjadi semakin parah karena tidak adanya institusi yang mengatur serta tidak adanya prosedur resmi yang ditetapkan. Berdasarkan negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, pada dasarnya negara-negara tersebut masih dapat menetapkan *gold standard* namun dilengkapi dengan ditetapkannya mata uang internasional. Harapannya, IMF yang dibentuk oleh Amerika Serikat dapat melaksanak fungsi utamanya antara lain mengatur mata uang dan konvertibilitas, memasok cadangan likuiditas serta menjadi forum konsultatif kerja sama antar pemerintah (De Vries 1976).

Akhirnya, setelah melaksanakan negosiasi yang panjang, pengambilan keputusan saat itu pun dilakukan melalui metode diskusi, *voting*, serta diakhiri dengan pembuatan *draft resolution*. Setelah itu, sebanyak 34 negara anggota menyetujui untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian yang telah dibuat pada Januari 1946. Dengan disetujuinya Sistem Bretton Woods ini oleh beberapa negara yang hadir dalam konferensi tersebut, maka sistem nilai tukar dunia pun berubah dari yang sebelumnya menggunakan *fixed exchange-rate* melalui emas sebagai alat tukarnya menjadi sistem dua standar, yaitu tetap menggunakan standar emas dan Dollar Amerika Serikat.

Richard Peet (2003) mengatakan jika ada lima poin model ekonomi politik internasional yang digunakan dalam Sistem Bretton Woods antara lain 1) negara-negara dapat menerapkan sistem mata uang yang sering diistilahkan dengan '*managed flexibility*' yang mana negara-negara dapat menggunakan variasi nilai tukar, baik menggunakan Dollar AS ataupun tetap menggunakan *fixed exchange-rate* melalui emas sebagai alat tukar, 2) dalam kurun waktu lima tahun sekali, negara-negara akan melakukan audit untuk mengumpulkan emas dan mata uang terkait pemberlakuan kuota, 3) semua negara anggota yang telah meratifikasi Sistem Bretton Woods harus melakukan kontrol eliminasi terhadap mata uangnya setelah lima tahun melakukan transisi ke mata uang yang telah disepakati bersama sehingga mata uang dapat dengan mudah dan lebih fleksibel untuk ditukarkan tanpa perlu adanya restriksi ataupun persetujuan dari IMF selaku institusi yang mengatur moneter internasional, 4) IMF menetapkan mata uang yang mampu menghasilkan surplus serta dapat menopang kekurangan serta 5) pembentukan institusi permanen yang ditujukan untuk mengatur sistem moneter internasional agar negara-negara dapat dengan mudah bertransaksi serta meningkatkan pertumbuhannya melalui institusi-institusi bentukan Sistem Bretton Woods tersebut antara lain IMF, World Bank serta WTO.

Jelas dapat dilihat jika sistem tersebut merupakan kepentingan Amerika Serikat sendiri yang digunakan untuk mengembalikan perekonomian dunia liberal berdasarkan pada lembaga baru yang pada dasarnya dapat dikendalikan. Sebagai kekuatan industrialis yang sangat dominan di dunia, perekonomian dunia paska perang yang sangat terbuka merupakan kesempatan dan keuntungan besar bagi Amerika Serikat dikarenakan hal ini memberikan jalan yang lebih baik bagi pasar luar negerinya (Jackson & Sorenson. 2005:250).

Institusi a la Amerika: IMF, World Bank dan WTO

Sebagai dukungan atas diterapkannya Sistem Bretton Woods sebagai institusi yang akan menjalankan peran-peran dalam mengatur sistem perekonomian, perdagangan serta moneter internasional, Amerika Serikat membentuk tiga institusi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dari Sistem Bretton Woods antara lain IMF (International Monetary Fund), World Bank dan WTO (World Trade Organization). IMF dibentuk pada bulan Juli tahun 1944 pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, AS ketika perwakilan dari 45 negara sepakat dan menyetujui suatu kerangka kerja sama ekonomi yang dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang menghasilkan Great Depression pada tahun 1930an (www.imf.org 2001, diakses pada 23 Mei 2015). Saat itu, kegiatan ekonomi di sejumlah negara industri sedang mengalami penurunan dimana negara-negara saat itu masih berusaha untuk mempertahankan ekonomi mereka masing-masing melalui peningkatan hambatan impor. Dan untuk mengatasi berkurangnya cadangan emas dan valuta asing, beberapa negara-negara yang membatasi kebebasan warga negaranya untuk membeli dari luar negeri, negara lainnya juga ada yang mendevaluasi mata uang mereka, bahkan beberapa negara juga mempersulit warga negaranya yang ingin memiliki valuta asing.

Ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu mempertimbangkan berbagai rencana untuk membangun kembali ketertiban dalam tatanan perekonomian dan moneter internasional hingga dibentuklah IMF tersebut. Beberapa negara merancang suatu piagam ataupun perjanjian-perjanjian dimana negara-negara yang tergabung di dalamnya setuju untuk menjaga nilai tukar mereka yang pada dasarnya ditentukan dalam dollar Amerika Serikat dan ditetapkan pada tingkatan yang dapat disesuaikan. Tetapi itupun hanya setelah mendapatkan persetujuan IMF. Gilpin mengatakan jika IMF dibentuk dalam peranannya sebagai lembaga moneter internasional yang melakukan stabilisasi moneter paska perang (Gilpin 1987:118-170).

Pada waktu yang bersamaan saat dibentuknya IMF sebagai institusi moneter internasional, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) atau yang saat ini dikenal sebagai Bank Dunia (*World Bank*) didirikan untuk mempromosikan pembangunan jangka panjang termasuk pembiayaan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan meningkatkan suplai air (www.imf.org 2001, diakses pada 23 Mei 2015). IMF dan Bank Dunia merupakan dua institusi yang saling melengkapi (komplementer) dimana perhatian IMF difokuskan pada kebijakan makro ekonomi dan sektor keuangan sedangkan Bank Dunia menangani isu pembangunan jangka panjang dan isu-isu pengurangan kemiskinan. Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan ataupun memperbaiki infrastruktur negaranya.

Ketika dua institusi tersebut sudah didirikan, Amerika Serikat berusaha untuk menyebarkan perekonomian liberal yang diusungnya melalui didirikannya institusi yang dinamakan WTO (World Trade Organization), organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan dunia pada tahun 1995 dimana sebelumnya telah dibentuk sebuah perjanjian mengenai tarif dan perdagangan, GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*).

Ketiga institusi yang dikembangkan berdasarkan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam Sistem Bretton Woods ini merupakan dasar dari pemikiran merkantilisme dimana dasar dari pemikiran ini adalah aktivitas ekonomi seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat. Dimana ekonomi adalah alat politik yang dijadikan suatu dasar bagi kekuasaan politik. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang

bertentangan, daripada sebagai wilayah kerja sama dan saling menguntungkan (Jackson & Sorenson. 2005:250). Singkatnya, persaingan ekonomi antar negara adalah permainan *zero-sum* di mana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lainnya. Dan negara juga harus khawatir mengenai keuntungan ekonomi relatif dikarenakan kekayaan material yang dikumpulkan oleh suatu negara dapat menjadi basis bagi kekuatan militer-politik yang dapat digunakan untuk melawan negara lainnya. Merkantilisme melihat jika kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing dalam lingkaran arus balik yang positif. Dimana dengan tercapainya kekuatan ekonomi, maka tentunya hal tersebut akan mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer suatu negara dan sebaliknya kekuatan militer politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi suatu negara (Jackson & Sorenson. 2005:250).

Bretton Woods System dan Stabilitas Hegemoni Amerika Serikat

Gramsci menggambarkan sistem hegemoni sebagai suatu keadaan dimana terdapat suatu kelompok yang menonjol dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tersupremasi bukan hanya dalam kekuatan fisik semata melainkan juga adanya pengakuan dari pihak-pihak lainnya yang mengakui jika suatu kelompok tersebut memang mendominasi (Litowitz. 2000). Menurut Gramsci, ada beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk mengatakan suatu negara sebagai sebuah negara hegemon antara lain perekonomian yang kuat dan stabil, kondisi geografis dan juga kekuatan militer yang kuat. Ketiga hal ini sudah dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai sebuah negara hegemon. Negara lainnya pun mengakui akan hal ini.

Dengan adanya sistem hegemon tersebut, tentu hal ini juga nantinya akan mempengaruhi tatanan dunia. Bull mengatakan jika tatanan dunia merupakan segala aktivitas yang di dalamnya terdapat keinginan untuk mencapai tujuan mereka. Aktivitas-aktivitas yang terjadi tentunya akan dipengaruhi oleh aktor yang memiliki peran dominan, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun militer (Mastanduno 2003:141-169). Aktor dominan inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam menciptakan stabilitas dan tatanan dunia bagi negara-negara lainnya. Hal itulah yang menghasilkan sebuah sistem hegemoni dan menjadikan Amerika Serikat sebagai suatu negara yang paling berpengaruh dalam tatanan dunia internasional saat ini. Mastanduno mengatakan jika dominasi yang dimiliki oleh aktor seperti Amerika Serikat tersebut tentunya dapat mempengaruhi dan mengontrol bagaimana jalannya sistem internasional (Mastanduno 2003:141-169). Maksudnya adalah setiap kebijakan yang ditetapkan oleh aktor tersebut dalam pergaulan internasionalnya pasti akan berdampak terhadap berbagai sektor yang ada dalam setiap perubahan yang terjadi dalam sistem internasional. Hegemon, kekuatan ekonomi dan militer yang dominan tentu diperlukan Amerika Serikat bagi penciptaan dan pembangunan sepenuhnya perekonomian pasar dunia liberal yang diusungnya karena jika kekuatan-kekuatan tersebut tidak ada, maka akan sangat sulit untuk mempromosikan dan menjalankan perekonomian liberal.

Sistem hegemon juga berkaitan dengan sistem unipolar dimana sistem ini menempatkan satu negara sebagai aktor utama yang memiliki peran paling mendominasi dalam tatanan dunia. Amerika Serikat, dengan kapasitas yang dimilikinya ditetapkan sebagai satu-satunya kekuatan unipolar paska Perang Dunia Kedua hingga keberhasilannya dalam melawan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Jika ada unipolar, tentu hubungan yang terjadi sifatnya akan menjadi asimetris dimana Amerika Serikat-lah yang mendominasi dan lebih menonjol dalam setiap interaksi internasional yang terjadi. Pencapaian yang didapatkan oleh Amerika Serikat dalam setiap peranannya dalam konteks dominasi global tidak dapat dipisahkan dari usahanya untuk tetap terlibat dalam setiap aktivitas internasional bahkan sejak Perang Dunia I dan II. Misalkan saja, setelah berakhirnya Perang Dunia I dimana Amerika Serikat ikut terlibat aktif dalam

usaha penyelesaian atas konflik yang terjadi dalam kedua perang tersebut. Amerika Serikat juga merupakan negara pendiri Liga Bangsa-Bangsa yang kini lebih dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai usahanya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam bidang ekonomi, Sistem Bretton Woods merupakan usaha Amerika Serikat dalam bidang perekonomian yang dibentuk atas dasar tidak adanya regulasi yang jelas mengenai sistem moneter internasional. Keberhasilan Amerika Serikat dalam menciptakan sistem baru dan revolusioner tersebut juga telah berhasil melahirkan tiga institusi internasional yang perannya juga sangat signifikan dalam tatanan perekonomian global saat ini. IMF dengan regulasinya dalam sistem moneter dan keuangan dunia, World Bank yang berupaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan infrastruktur serta mengurangi kemiskinan di dunia serta WTO yang mempromosikan perdagangan bebas dalam berbagai sektor yang ingin menghapuskan kebijakan proteksionisme dari negara-negara di dunia.

Berbicara mengenai teori stabilitas hegemonik dan mengapa teori ini penting untuk mengkaji bagaimana hegemoni Amerika Serikat dalam tatanan ekonomi global, maka kita harus mengkaitkannya dengan hubungan ekonomi internasional yang liberal yang tergantung pada kehadiran suatu kekuatan dominan liberal, dalam hal ini yang berperan sebagai hegemon. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika tidak ada hegemon dalam tatanan global, maka perekonomian dunia yang ingin diusung dalam *platform* liberalisasi ekonomi juga akan sulit untuk dipertahankan. Sepanjang krisis ekonomi yang terjadi tahun 1930-an, Amerika Serikat merupakan kekuatan yang dominan serta hegemonik namun tidak berniat untuk bertanggungjawab dalam menciptakan tatanan perekonomian liberal. Keinginan tersebut baru muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dimana Amerika Serikat mulai memainkan peran pentingnya dalam menciptakan kondisi perdamaian dan stabilitas internasional (Jackson & Sorenson 2005:250). Perang tersebut meningkatkan posisi Amerika Serikat dalam interaksi internasional dan menempatkannya pada posisi pemimpin dunia yang hampir tidak tersaingi. Sehingga, muncul reaksi dari kalangan masyarakat internasional yang meminta Amerika Serikat untuk mengambil tanggung jawab dalam menciptakan perekonomian pasar dunia yang liberal.

Terkait dengan mengapa suatu hegemon diperlukan untuk menciptakan perekonomian dunia yang liberal dilihat dari sifat-sifat barang yang disediakan. Perekonomian dunia liberal juga disebut dengan barang publik ataupun kolektif yang merupakan barang atau jasa yang sekali dialirkan akan menciptakan keuntungan bagi setiap orang. Barang publik dicirikan oleh *non-excludability* dimana yang lain tidak dapat menyangkal akses padanya. Misalnya saja trotoar ataupun jalan yang merupakan barang publik. Elemen-elemen perekonomian dunia liberal seperti sistem nilai tukar bagi pembayaran internasional ataupun kemungkinan berdagang dalam pasar bebas adalah contoh dari barang publik. Dimana sekali barang tersebut diciptakan, maka barang-barang tersebut akan menjadi keuntungan bagi semua pihak. Salah satu tugas dari Amerika Serikat sebagai hegemon terkait dengan penyediaan barang publik dalam tatanan perekonomian liberal adalah untuk menghindari adanya *free riding* yang mendapatkan manfaat dari barang-barang tersebut tanpa adanya kontribusi.

Sistem Bretton Woods yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya merupakan sebuah aksi dominasi yang sepenuhnya dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memberikan pengaruh dan membuat regulasi tatanan perekonomian global yang sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Dalam pelaksanaannya, IMF merupakan institusi hasil Sistem Bretton Woods yang memiliki beberapa tujuan yang erat dengan tujuan mempromosikan ekonomi liberal yang diusung Amerika Serikat seperti (Farwell 1966:732) 1) untuk memajukan kerja sama moneter internasional

dengan cara mendirikan IMF tersebut, 2) untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia, 3) mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional, 4) menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang dengan ketentuan-ketentuan tertentu, 5) memperkecil besarnya defisit ataupun surplus neraca pembayaran serta 6) untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing.

Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam IMF juga mengarah kepada keinginan Amerika Serikat untuk menetapkan dollar AS sebagai mata uang internasional. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan IMF dimana semua mata uang negara anggota harus ditetapkan nilai paritasnya terhadap dollar AS atau terhadap emas dengan nilai ekuivalennya. Sedangkan mata uang dollar AS ditetapkan nilai konvertibelnya terhadap emas dengan perbandingan 1 ounce emas = \$35 (elearning.gunadarma.ac.id, diakses pada 22 Mei 2015). Oleh karenanya, banyak pihak yang menyebut jika Sistem Bretton Woods termasuk dalam kelompok sistem standar dollar emas yang memiliki pengertian dimana dollar dan emas dijadikan sebagai patokan dan tonggak penilaian terhadap mata uang negara-negara anggotanya. Sehingga, karena semua mata uang nilai paritasnya dinyatakan dalam bentuk dollar AS, maka dollar AS dapat juga difungsikan sebagai numeraire. Setelah itu, tugas untuk menjaga agar kurs yang berlaku tidak menyimpang dari batasan yang telah ditetapkan diberikan kepada negara anggotanya. Sedangkan, Amerika Serikat bebas dari kewajiban tersebut dikarenakan mata uangnya digunakan sebagai numeraire dalam sistem moneter internasional. Hal ini merupakan salah satu contoh dimana dominasi dan kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat menempatkannya pada posisi sebagai pemimpin dimana Amerika Serikat mendapat banyak keuntungan akan hal tersebut.

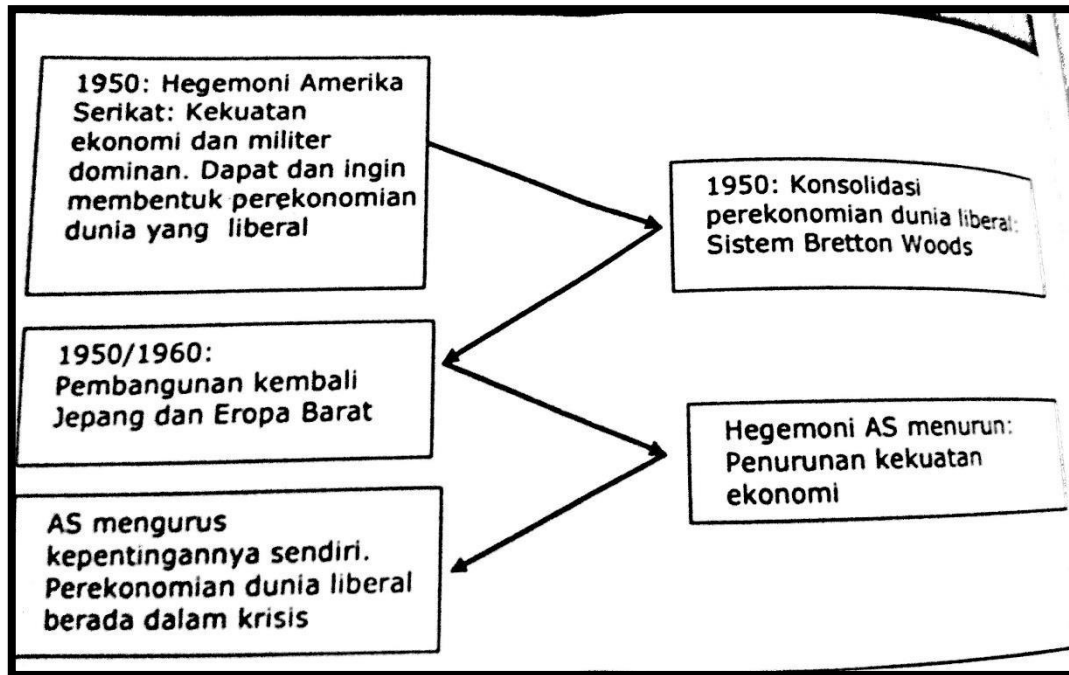
Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan banyak negara di dunia yang memiliki cadangan internasional yang sedikit, kecuali Amerika Serikat karena Amerika Serikat setidaknya memiliki tiga per empat cadangan emas yang ada di seluruh dunia saat itu. Pada tahun 1946 misalnya, dari seluruh stok emas yang ada di dunia seharga US\$ 36 milyar, sejumlah US\$ 26 milyar berada di tangan Amerika Serikat (elearning.gunadarma.ac.id, diakses pada 22 Mei 2015). Kekuatan ekonomi Amerika Serikat paska Perang Dunia II menjadikannya hegemon terkuat sehingga memungkinkan untuk membantu banyak negara dalam merekonstruksi negaranya paska berperang dalam Perang Dunia II. Selain itu, negara-negara anggota IMF juga diwajibkan untuk membayar kuota yang ditentukan dari besarnya pendapatan nasionalnya sebesar 25 persen dalam bentuk emas maupun dollar AS sedangkan sisanya dibayarkan dalam bentuk mata uang negara masing-masing. Mata uang dollar seakan diarahkan untuk menjadi nilai tukar tunggal dalam sistem moneter internasional dimana di setiap institusi bentukan Sistem Bretton Woods yang dimotori oleh Amerika Serikat, menggunakan dollar AS sebagai sistem nilai tukarnya. Hingga saat ini, emas sudah tidak lagi digunakan dan tersisa dollar AS sebagai mata uang internasional yang digunakan secara global dalam berbagai transaksi internasional.

Kemunduran Sistem Bretton Woods: Krisis Amerika Serikat dan Munculnya Saingan Baru

Kejayaan Sistem Bretton Woods sayangnya tidak berlangsung lama, dikarenakan Amerika mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan kondisi perekonomiannya. Akhir tahun 1950-an, perekonomian Eropa Barat dan Jepang mulai pulih sehingga hampir menyamai Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun 1970, untuk pertama kalinya Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dalam era paska perang. Dalam situasi krisis seperti ini, Amerika mulai mengubah orientasinya dimana lebih mementingkan dan memfokuskan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu dibandingkan mempertahankan perekonomian liberal paska 1945 dengan langkah-

langkah seperti melakukan proteksionisme untuk mendukung perekonomiannya sendiri (Jackson & Sorenson 2005:250-252). Penurunan Amerika Serikat ini membuat tidak ada lagi kekuatan yang benar-benar dominan untuk mempertahankan perekonomian dunia liberal.

Gambar 1. Alur Hegemoni Amerika Serikat



Berdasarkan alur hegemoni di atas, jelas terlihat jika sejak tahun 1950an paska berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat dengan kapasitas kekuatan ekonomi dan militernya berusaha untuk membentuk perekonomian liberal melalui Sistem Bretton Woods dan institusi-institusi bentukannya. Namun eksistensinya mengalami penurunan sejak ada saingan kekuatan ekonomi baru yaitu Eropa Barat dan Jepang yang ekonominya telah pulih paska perang. Hal ini diperparah dengan terjadinya krisis yang terjadi di Amerika pada tahun 1970-an karena defisit perdagangan yang mengharuskan Amerika untuk mengurus kepentingan nasionalnya terlebih dahulu daripada sibuk untuk mempromosikan liberalisasi ekonomi yang diusungnya.

Gejolak ekonomi yang dialami Amerika Serikat karena defisit mengakibatkan nilai dollar Amerika Serikat menjadi turun yang mengakibatkan banyak negara-negara yang enggan untuk menukarkan dollar AS karena takut akan juga terkena dampak devaluasi dari menurunnya nilai dari mata uang tersebut. Posisi dollar yang tidak stabil saat itu memaksa Presiden Nixon yang memimpin Amerika saat itu untuk memberlakukan kebijakan untuk tidak menggunakan nilai emas sebagai standar nilai dollar lagi yang mengakibatkan nilai emas terus mengalami fluktuasi dan inilah cikal-bakal dari berakhirnya Sistem Bretton Woods. Bisa dikatakan, sistem tersebut dibentuk dan diakhiri juga oleh Amerika Serikat. Sebagai aktor hegemon, kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat tentunya berdampak terhadap lingkungan internasional. Salah satunya adalah sistem nilai tukar saat itu yang menjadi sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange-rate*) dimana menurut Simmons, sistem ini didasarkan atas permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing dimana perubahan kurs mengambang secara bebas (Simmons 2000:573).

Dikaitkan dengan teori stabilitas hegemoni, nyatanya teori ini juga tidak sepenuhnya

dapat menjelaskan kejayaan posisi Amerika sebagai aktor hegemon dominan yang memiliki peran signifikan dalam tatanan perekonomian global paska Perang Dunia I dan II. Sistem Bretton Woods yang diusung nyatanya tidak mampu mempertahankan perekonomian liberal dikarenakan faktor-faktor domestik yang terjadi di Amerika Serikat. Kindleberg memang menyatakan dunia memerlukan seorang pemimpin untuk dapat menaungi negara-negara lain dengan kapasitas dan kekuatan yang dimilikinya. Amerika Serikat memang sukses menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan rezim internasional dan memaksa negara lainnya untuk menerima dan mengikuti regulasi yang diciptakannya. Nilai-nilai liberal yang sesuai dengan ideologi Amerika juga berhasil diserap dalam institusi internasional seperti IMF dan WTO. Nye mengatakan jika ini memberikan Amerika “kekuatan *co-optive*” yaitu kemampuan untuk membentuk situasi sehingga bangsa-bangsa lain mengembangkan pilihan-pilihan atau untuk menentukan kepentingan-kepentingannya dengan cara yang sesuai dengan bangsanya (Nye 1990). Namun, krisis yang terjadi menghancurkan sistem yang dibuatnya sendiri. Kemunculan *new emerging economic countries* seperti Jepang dan Eropa Barat setelah pulih paska perang juga menjadi salah satu faktor berakhirnya Sistem Bretton Woods tersebut.

Kesimpulan

Hegemoni Amerika Serikat paska Perang Dunia I dan II dalam perekonomian internasional memang tidak dapat dihiraukan karena kekuatan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi maupun militer menjadikannya sebagai negara yang mendominasi negara-negara lainnya. Sistem Bretton Woods yang dibentuk pada tahun 1944 merupakan kinerja Amerika Serikat untuk menciptakan tatanan sistem moneter baru dimana emas tidak lagi bisa menjadi nilai tukar tunggal dimana Amerika Serikat menetapkan dollar sebagai nilai tukar pengganti emas. Meskipun, pada akhirnya krisis besar yang terjadi tahun 1970an mengakibatkan Amerika Serikat mengalami defisit yang besar yang mengakibatkan perannya sebagai hegemon terkuat dalam bidang ekonomi sedikit tergeser, ditambah dengan perekonomian Eropa Barat dan Jepang yang kembali pulih di akhir tahun 1950an. Teori stabilitas hegemon kurang bisa menjelaskan bagaimana seorang aktor dominan bisa sepenuhnya menjadi pemimpin apabila suatu waktu mengalami penurunan dalam hal kekuatan-kekuatan utama seperti ekonomi maupun militer. Munculnya hegemon-hegemon baru nyatanya menggeser posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin unipolar. Meskipun banyak yang masih mengakui Amerika sebagai unipolar di dunia, namun kita tidak bisa pula menolak jika fakta justru mengatakan jika unipolaritas tidak lagi eksis dengan munculnya pemimpin-pemimpin baru dalam bidang ekonomi maupun militer.

Referensi

- Bordo, MD & Eichengreen, B. 1993. *A Restropective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform*. Chicago: University of Chicago Press
- De Vries, MG. 1976. *The International Monetary Fund, 1966-1971*. Washington: International Monetary Fund
- Farwell, Loring C. 1966. *Financial Institution*. Illinois: Richard D. Irwin Inc., hlm. 732
- Gilpin, Robert. 1987. “International Money Matters”, dalam *The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, pp. 118-170
- Helleneir, Eric. 2008. *The Evolution of the International Monetary and Financial System*, dalam John Ravenhill “Global Politic Economy. Oxford: Oxford University Press

- Jackson, Robert & Sorenson, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 249
- Litowitz, D. 2000. *Gramscy, Hegemony, and The Law*. Brigham Young University Law Review, Vol. 2000 Issue 2
- Mastanduno, M. 2003. *Chapter 4: Incomplete Hegemony: The United States and Security Order in Asia*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 141-169
- Nye, Joseph. 1990. *Bound to Lead: The Changing Nature al American Power*. New York: Basic
- Peet, Richard. 2003. *Bretton Woods: Emergence of a Global Economic Regime dalam Unhold Trinity: The IMF, World Bank and WTO*. London: Zed Books, pp.27
- Simmons, B. 2000. *The Legalization of International Monetary Affairs*. International Organization 54, no. 3, hlm. 573
- N.n. n.d. *Bab 4: Sistem Keuangan Internasional: Dari Masa ke Masa* (online), (elearning.gunadarma.ac.id/...international/bab4sistem_keuan gan_intern.. diakses pada 22 Mei 2015 pukul 22.45 WIB)
- N.n. 2001. *Apakah Dana Moneter Internasional?* (online), (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf> diakses pada 23 Mei 2015 pukul 17.45 WIB)